

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Tulis	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran.....	xii
Daftar Singkatan	xiii
Intisari	xv
<i>Abstract</i>	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	7
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Motivasi Penelitian	8
1.6 Kontribusi Penelitian	8
1.7 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian	9
1.8 Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Model Implementasi Kebijakan Publik (IKP).....	12
2.1.1 Perkembangan Studi Implementasi.....	12
2.1.2 Model IKP menurut George C. Edwards III (1980).....	13

2.1.3	Model IKP dalam Transaksi Nontunai.....	16
2.2	Transaksi Nontunai (TNT).....	18
2.2.1	Dasar Pelaksanaan TNT.....	18
2.2.2	Proses dan Manfaat Penerapan TNT.....	19
2.2.3	Mekanisme Penerapan TNT dalam Transaksi Belanja Daerah.....	21
2.3	Penelitian Terdahulu	21
2.4	Kerangka Pemikiran.....	24
BAB III METODE PENELITIAN		25
3.1	Rasionalitas Objek Penelitian	25
3.1.1	Kabupaten Agam.....	26
3.1.2	Kota Padang Panjang	27
3.2	Desain Penelitian	28
3.3	Sumber Data.....	29
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.5	Teknik Analisis Data.....	33
3.5.1	Analisis Data Kasus Individu.....	33
3.5.2	Analisis Data Lintas Kasus (<i>Cross Case Analysis</i>).....	35
3.6	Teknik Pengujian Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		38
4.1	Deskripsi Data.....	38
4.2	Analisis dan Pembahasan.....	41
4.2.1	Gambaran Umum Pelaksanaan TNT	42
4.2.1.1	Pelaksanaan TNT di Kabupaten Agam	43
4.2.1.2	Pelaksanaan TNT di Kota Padang Panjang.....	48
4.2.2	Analisis Pelaksanaan TNT berdasarkan Model IKP	52

4.2.2.1 Analisis Implementasi TNT di Kabupaten Agam.....	55
4.2.2.2 Analisis Implementasi TNT di Kota Padang Panjang.....	82
4.2.3 Faktor Penyebab Rendahnya Realisasi TNT.....	100
4.2.3.1 Komunikasi	101
4.2.3.2 Sumber Daya.....	104
4.2.3.3 Disposisi (Sikap)	106
4.2.3.4 Struktur Birokrasi.....	108
BAB V SIMPULAN	111
5.1 Simpulan	111
5.2 Keterbatasan.....	114
5.3 Implikasi	115
5.4 Rekomendasi.....	115
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN.....	121

Daftar Tabel

Tabel 1. 1 Laporan Realisasi APBD Secara Nontunai s/d 30 Juni 2019	4
Tabel 2. 1 Manfaat TNT Secara Internal dan Nasional	20
Tabel 2. 2 Mekanisme Pembayaran Nontunai Menggunakan NCM	21
Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3. 1 Sumber Data, Informasi, Teknik Pengumpulan Data, dan Partisipan/Dokumen.....	31
Tabel 4. 1 Rincian Narasumber, Tanggal Wawancara, dan Durasi	39
Tabel 4. 2 Gambaran Umum Pelaksanaan TNT di Pemkab Agam dan Pemko Padang Panjang	42
Tabel 4. 3 Pihak yang terlibat dalam Pelaksanaan TNT Pemko Padang Panjang	52
Tabel 4. 4 Hasil Analisis Dimensi IKP	53
Tabel 4. 5 Matriks Implementasi TNT Kabupaten Agam Tahun 2019	63
Tabel 4. 6 Keadaan Riil Pegawai Bakeuda Kabupaten Agam	64
Tabel 4. 7 Komposisi Pegawai Bakeuda Kab. Agam Berdasarkan Golongan.....	64
Tabel 4. 8 Tingkat Pendidikan Pegawai Bakeuda Kab. Agam	65
Tabel 4. 9 Pelaksana Implementasi TNT BPKD Kota Padang Panjang	89
Tabel 5. 1 Hambatan Pelaksanaan TNT Pemkab Agam dan Pemko Padang Panjang	113

Daftar Gambar

Gambar 1. 1 Laporan Perkembangan Implementasi TNT di Indonesia Tahun 2018	3
Gambar 2. 1 Prosedur Pembayaran Nontunai pada Pemerintah Daerah.....	21
Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran.....	24
Gambar 3. 1 Langkah-Langkah Analisis Data Kasus Individu	33
Gambar 3. 2 Langkah-Langkah Analisis Data Lintas Kasus	36
Gambar 4. 1 Mekanisme Pelaksanaan TNT.....	42
Gambar 4. 2 Triangulasi Penambahan Komponen Belanja TNT Kab. Agam	44
Gambar 4. 3 Peraturan TNT pada Kota Padang Panjang.....	49
Gambar 4. 4 Diagram <i>Venn</i> Analisis Lintas Kasus.....	100
Gambar 4. 5 Triangulasi Tema Lintas Kasus “Komunikasi”.....	103
Gambar 4. 6 Triangulasi Tema Lintas Kasus "Sumber Daya Fasilitas"	105
Gambar 4. 7 Triangulasi Tema Lintas Kasus "Sumber Daya Wewenang"	106
Gambar 4. 8 Triangulasi Tema Lintas Kasus "Komitmen Pimpinan"	107
Gambar 4. 9 Triangulasi Tema Lintas Kasus " <i>Reward dan Punishment</i> "	108
Gambar 4. 10 Triangulasi Tema Lintas Kasus "Kekuatan Hukum Surat Edaran"	110
Gambar 4. 11 Triangulasi Tema Lintas Kasus "Sistem dan Prosedur TNT"	110

Daftar Lampiran

- Lampiran 1 Protokol Wawancara
- Lampiran 2 Contoh *Member Checking* Partisipan Penelitian di Pemkab Agam
- Lampiran 3 Contoh *Member Checking* Partisipan Penelitian di Pemko Padang Panjang
- Lampiran 4 Daftar Kode dan Tema Penelitian
- Lampiran 5 Surat Izin Penelitian pada Pemkab Agam
- Lampiran 6 Surat Izin Penelitian pada Pemko Padang Panjang
- Lampiran 7 Surat Keterangan Penyuntingan Tesis
- Lampiran 8 Surat Keterangan Penerjemahan Abstrak Tesis

Daftar Singkatan

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APMK	Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
ATM	<i>Automated Teller Machine</i>
Bakeuda	Badan Keuangan Daerah
BI	Bank Indonesia
BPD	Bank Pembangunan Daerah
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKD	Badan Pengelola Keuangan Daerah
BUD	Bendahara Umum Daerah
GCG	<i>Good Corporate Governance</i>
GNNT	Gerakan Nasional Nontunai
HP	<i>Handphone</i>
ICW	Indonesian Corruption Watch
IKP	Implementasi Kebijakan Publik
Inbup	Instruksi Bupati
Inpres	Instruksi Presiden
Kab.	Kabupaten
Kabid	Kepala Bidang
KPA	Kuasa Pengguna Anggaran
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan
LRA	Laporan Realisasi Anggaran
Mendagri	Menteri Dalam Negeri
NCM	<i>Nagari Cash Management</i>
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
OTP	<i>One Time Password</i>
PA	Pengguna Anggaran
PC	<i>Personal Computer</i>
Pemda	Pemerintah Daerah
Pemkab	Pemerintah Kabupaten

Pemko	Pemerintah Kota
Pemprov	Pemerintah Provinsi
Perbup	Peraturan Bupati
Perda	Peraturan Daerah
Perjadin	Perjalanan Dinas
Permendagri	Peraturan Menteri Dalam Negeri
Perwako	Peraturan Walikota
PP	Peraturan Pemerintah
PPATK	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
PPKD	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
PPTK	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Rakor	Rapat Koordinasi
RKUD	Rekening Kas Umum Daerah
SDM	Sumber Daya Manusia
SE	Surat Edaran
Sisdur	Sistem dan Prosedur
SK	Surat Keputusan
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPKD	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
SMS	<i>Short Message Service</i>
SOP	Standar Operasional Prosedur
SPJ	Surat Pertanggungjawaban
TNT	Transaksi Nontunai
Tupoksi	Tugas, Pokok, dan Fungsi
UU	Undang-Undang
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian